

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Amiruddin dan Zainal Asikin, 2008 , *Pengaturan Metode Penelitian Hukum*,
Jakarta: Raja Grafindo Persada

Bambang Waluyo, 2008, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Jakarta: Sinar
Grafika

Gede Marhaendra Wija Atmaja,dkk , 2018 , *Hukum Perundang-undangan*.
Kabupaten Ponorogo: Uwais Inspirasi Indonesia

Ismantoro Dwi Yuwono, 2013, *Memahami Berbagai Etika Profesi & Pekerjaan*,
Yogyakarta: Media Pressindo

Lutfil Ansori, 2019, *Legal Drafting: Teori dan Praktik Penyusunan Peraturan
Perundang-Undangan*. Depok:PT RajaGrafindo Persada

Marhendra Wija Atmaja, 2016, *Pemahaman Dasar Hukum Perundang-undangan*,
Denpasar: Fakultas Hukum Universitas Udayana

Rachman Hermawan, 2006 , *Etika Pustakawan : Suatu Pendekatan Terhadap
Kode Etik Pustakawan Indonesia*, Jakarta : Sagung Seto

Sutrisno dan Wiwin Yulianingsih, 2016, *Etika Profesi Hukum*, Yogyakarta: C.V
Andi Offest (Penerbit Andi).

Soerjono Soekanto, 2007, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI-Press

Widodo, 2017, *Metodologi Penelitian Populer & Praktis*, Jakarta: Raja Grafindo

Zainuddin Ali, 2016, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika

B. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

Undang-Undang Nomor 15 tahun 1961 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kejaksaan Republik Indonesia

Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pemberhentian Dengan Hormat, Pemberhentian Tidak Dengan Hormat, dan Pemberhentian Sementara, serta Hak Jabatan Fungsional Jaksa Yang Terkena Pemberhentian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 41; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4827);

Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2021 Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia

Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2011 tentang Komisi Kejaksaan Republik Indonesia

Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor PER- 067/A/JA/07/2007 tentang Kode Perilaku Jaksa.'

Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor PER- 014/A/JA/11/2012 tentang Kode Perilaku Jaksa

Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang
Penanganan Laporan dan Perlindungan terhadap Pelapor

C. Jurnal

Iqbal Arindra: *Hubungan Lembaga Penegak Hukum dalam Sistem Peradilan
Pidana.*

https://www.academia.edu/6807043/Hubungan_Lembaga_Penegak_Hukum_dalam_Sistem_Peradilan_Pidana

Surya Baskara , 2017, Makalah Etika Profesi Hukum: *Etika Profesi Jaksa*

https://www.academia.edu/40382284/ETIKA_PROFESI_JAKSA

Hartono Achien: *Teori Hierarki Perundang-undangan,*

<https://hartonoachiencom.wordpress.com/2018/09/14/teori-hirarki-perundang-undangan/>

Agus Budianto, dkk. 2013. Jurnal: *Penguatan Fungsi Pengawasan dalam Sistem
Penegakan Hukum Sebagai Upaya Menekan Judicial Corruption.*

Tangerang: Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan ,

<https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/9036/13694> ,

Husin Husaini dan Muhammad Afdhal Askar, 2020, *Jurnal: Kedudukan
Kejaksaan dan Pengisian Jabatan Jaksa Agung dalam Sistem
Ketanegaraan Indonesia.*

<http://www.ejournal.kampusmelayu.ac.id/index.php/Bertuah/article/view/167/109>

D. Website

Pengertian Jaksa: *Syarat, Tugas dan Kewenangan.*

<https://jagad.id/pengertian-jaksa/>

Kejari Sintang: Sejarah Kejaksaan

<https://kejari-sintang.go.id/sejarah-kejaksaan>

Definisi dan Pengertian Perilaku.

<http://www.definisi-pengertian.com/2015/04/definisi-dan-pengertian-perilaku>

[konsep.html](#)

Kejaksaan Negeri Tanah Laut: *“Tri Krama Adhyaksa”*

<https://www.kejari-tanahlaut.go.id/tri-krama>

Hierarki Peraturan Perundang-undangan di Indonesia

<https://www.banjarsari-labuhanhaji.desa.id/artikel/2020/1/11/hierarki-peraturan>

[perundang-undangan-di](#)

[indonesia#:~:text=HIERARKI%20PERATURAN%20PERUNDANG](#)

[UNDANGAN%20DI%20INDONESIA.%20Hierarki%20maksudnya%20a](#)

[dalam%20boleh%20bertentangan%20dengan%20peraturan%20perundang](#)

[undangan%20yang%20lebih%20tinggi.](#)

Kejaksaan RI: *Penyerahan Agenda Pembaruan Kejaksaan RI kepada Presiden RI,*

[https://www.kejaksaan.go.id/reformasi_birokrasi.php?section=4,](https://www.kejaksaan.go.id/reformasi_birokrasi.php?section=4)



Detik.com: *Menang di PTUN, Keluarga Korban Semanggi Minta Presiden Tegur*

Jaksa Agung

<https://news.detik.com/berita/d-5241296/menang-di-ptun-keluarga-korban-semanggi-minta-presiden-tegur-jaksa-agung>

Peraturan Perundang-undangan Nasional: Pengertian, Urutan, Asas dan Sumber

Hukumnya

<https://www.kitapunya.net/peraturan-perundang-undangan-nasional/#:~:text=Pengertian%20Peraturan%20Perundang-undangan%20adalah%20suatu%20aturan%20yang%20bentuknya,megikat%20secara%20umum%20%28berlaku%20secara%20umum%20anpa%20terkecuali%29.>

Apakah kode etik termasuk peraturan perundang-undangan?,

<https://www.hukumonline.com/klinik/a/apakah-kode-etik-termasuk-peraturan-perundang-undangan-cl2327>

Kebijakan: Pengertian, tingkatan, macam, menurut para ahli

<https://pendidikan.co.id/kebijakan-pengertian-tingkatan-macam-menurut-para-ahli/>

Kemana bisa melakukan pengujian peraturan kebijakan,

<https://www.hukumonline.com/klinik/a/ke-mana-bisa-melakukan-pengujian-peraturan-kebijakan-lt5f4b669c17662>